



**Mahasiswa Sebagai *Role Model* Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi *Magistrorum Et Scholarium***

**Annasthazia Iola Putri, Vlorencus Jupinter Lase**  
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: [annasthaziaputri@gmail.com](mailto:annasthaziaputri@gmail.com), [vlorencusjupinterlase@gmail.com](mailto:vlorencusjupinterlase@gmail.com)

---

**INFO ARTIKEL**

**Kata kunci:**

mahasiswa, role model, kebebasan berekspresi, pendidikan tinggi.

**Keywords:**

students, role models, freedom of expression, higher education

---

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada kontradiksi antara peran mahasiswa sebagai role model dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dengan sistem pendidikan tinggi Indonesia yang masih hierarkis dan konformis. Secara historis, mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan sosial, namun realitas menunjukkan bahwa struktur akademik yang kaku dan budaya senioritas membatasi ruang ekspresi mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak sistem pendidikan tersebut terhadap peran mahasiswa serta mengevaluasi pendekatan alternatif seperti visi *Magistrorum et Scholarium* dari UKSW. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pendidikan yang top-down dan relasi dosen-mahasiswa yang tidak setara melemahkan daya kritis mahasiswa, menciptakan ketegangan psikologis, dan mengurangi efektivitas mereka sebagai role model. Di sisi lain, visi UKSW menawarkan model egaliter yang mendorong kebebasan berekspresi dan dialog kritis. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistem pendidikan tinggi yang lebih demokratis dan inklusif untuk memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan.

**ABSTRACT**

*The background of this study focuses on the contradiction between the role of students as role models in fighting for freedom of expression and the hierarchical and conformist nature of Indonesia's higher education system. Historically, students have been regarded as agents of social change; however, reality shows that rigid academic structures and a culture of seniority limit their space for expression. The objective of this research is to examine the impact of the education system on the role of students and to evaluate alternative approaches such as the *Magistrorum et**

## Mahasiswa Sebagai Role Model Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi Magistrorum Et Scholarium

*Scholarium vision from UKSW. The research method employs a qualitative approach using literature analysis, conceptual analysis, and case studies. The research findings reveal that the top-down education system and unequal faculty-student relationships weaken students' critical thinking abilities, create psychological tension, and reduce their effectiveness as role models. On the other hand, UKSW's vision offers an egalitarian model that promotes freedom of expression and critical dialogue. The implications of this research emphasize the need for democratic and inclusive higher education system reforms to empower students as agents of change.*

---

### PENDAHULUAN

Mahasiswa secara historis telah memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial dan penjaga nilai-nilai demokrasi, termasuk dalam memperjuangkan hak atas kebebasan berekspresi (Subekti & Wulandari, 2019). Sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga Reformasi 1998, mahasiswa Indonesia konsisten menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan, menentang ketimpangan, dan mengkritisi kekuasaan (Pambudi & Handayani, 2022). Peran ini menjadikan mahasiswa sebagai *role model* kebebasan berekspresi yakni figur yang tidak hanya menyuarakan kebenaran, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anshari et al., 2020). Edward Shils mengategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas (Guntaradewa, 2018). Shils menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual yakni mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan kebersamaan, mempengaruhi perubahan sosial, dan memainkan peran politik (Akbar, 2016; Siregar, 2018). Di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak negara, calon pemimpin masa depan, pencari kebenaran, serta agen perubahan (Fauzi, 2021). Tidak salah jika mahasiswa sering kali dijadikan *role model* dari implementasi sekelompok masyarakat kecil yang berintelektual. *Role model* terdiri dari dua kata yaitu *role* (peran) dan *model* (teladan) yang apabila digabungkan membentuk makna baru, yaitu seseorang yang perilakunya diikuti, dicontoh serta ditiru (Savitri & Rahman, 2020; Widodo, 2023).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas kebebasan berekspresi tidak hanya termasuk dalam hak sipil dan politik yang melekat di dalam diri setiap individu, tetapi juga bersifat fundamental dan mendasar serta wajib dihargai dalam negara hukum demokratis (Gunawan, 2018; Widodo & Fauzan, 2021). Hak ini merupakan elemen vital dalam menjaga ruang publik yang bebas dan terbuka, termasuk di lingkungan akademik (Setiadi, 2020). Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan menjadi *role model* dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan kritik,

serta terlibat aktif dalam diskusi publik yang konstruktif (Syahputra, 2019; Harahap & Yusuf, 2023). Peran mahasiswa tidak hanya memperkuat demokrasi deliberatif tetapi juga menciptakan budaya intelektual yang sehat (Nurhayati & Wulandari, 2022; Hamid, 2017).

Sayangnya, pada realitas di banyak perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi mendalam antara peran ideal mahasiswa dan kondisi sistem pendidikan tinggi yang masih berpedoman dengan nilai-nilai hierarkis dan budaya konformitas. Struktur akademik yang *top-down*, hubungan antara dosen dan mahasiswa tidak sedikit bersifat satu arah dan menempatkan mahasiswa dalam posisi pasif. Kritik dari mahasiswa kerap dipandang sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai ekspresi intelektual yang sah. Akibatnya kampus justru menjadi ruang yang membatasi, bukan merayakan kebebasan berpikir dan berekspresi. Hal inilah yang pada akhirnya membawa pada penurunan kualitas kritik pada mahasiswa.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), melalui visinya *Magistrorum et Scholarium* secara filosofis menempatkan dosen dan mahasiswa dalam relasi setara sebagai mitra intelektual dalam pencarian kebenaran. Visi ini merepresentasikan model pendidikan yang lebih humanis dan demokratis, di mana kebebasan berpikir dan berekspresi menjadi elemen utama dalam kehidupan akademik. UKSW menjadi contoh menarik dalam mengatasi kontradiksi yang selama ini menjadi problem sistemis di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Di tengah sistem pendidikan nasional yang masih kaku dan sentralistis, pendekatan UKSW dapat menjadi contoh dalam membangun budaya akademik yang sehat dan inklusif.

Dengan begitu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran mahasiswa sebagai *role model* kebebasan berekspresi dapat ditegakkan secara utuh di tengah tantangan sistemis, serta bagaimana visi *Magistrorum et Scholarium* dapat menjadi pendekatan transformasionalis dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, dialogis, dan demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian hukum. Dimana penelitian hukum ini akan memberikan penjelasan hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh mahasiswa di tengah budaya hierarkis dan konformitas. Dalam tulisan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian yang menggunakan hukum, asas/prinsip, serta aturan sebagai dasar argumentasi penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan ini akan menjadi sumber hukum untuk memberikan dan menguatkan argumen hukum atas penelitian tentang hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melaksanakan haknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Mahasiswa Sebagai *Role Model* Dalam Memperjuangkan Kebebasan Berekspresi**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negaranya yang diimplementasikan dalam berbagai instrumen hukum yakni UUD tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 9 Tahun 1998

## **Mahasiswa Sebagai Role Model Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi Magistrorum Et Scholarium**

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan masih banyak instrumen hukum lainnya yang menjamin warga negara Indonesia (dalam hal ini mahasiswa) untuk melaksanakan hak berekspresinya. Kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu Negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter (Della Lusky Selian, Cairin Melina, 2018)

Mahasiswa yang digolongkan sebagai masyarakat kecil dan pengembangan kepemimpinan serta *role model* bagi masyarakat umum memiliki hak atas kebebasan berekspresi yang dapat diekspresikan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Sejarah mencatat kebebasan berekspresi di Indonesia sudah dari dulu terukir dan di giat oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, dimana mereka mengiat hak atas berekspresi dalam berbagai jenis, yakni: diskusi, kampanye, lokakarya, pers dan bahkan aksi unjuk rasa (demonstrasi) untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Mahasiswa dalam memperjuangkan hak asasi manusia atas perubahan sosial yang melanggar hak-hak warga negara. Perjuangan yang dilakukan bukanlah hal yang mudah dan gampang banyak sekali tantangan dan hambatan yang sering timbul baik dalam internal maupun eksternalnya, adapun hambatannya antara lain: regulasi pembatasan hak atas berekspresi, adanya stigma sosial dimana mahasiswa dianggap memberontak atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga mengakibatkan pembungkaman sistem sosial patriarki, serta kurangnya kesadaran akan pemahaman atas hak-hak yang melekat pada diri.

Kebebasan berekspresi yang diimplementasi memberikan dampak yang signifikan dan membawa perubahan bagi lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut dikategorikan dalam dua jenis yaitu pertama, dampak positif dimana mahasiswa dan mahasiswi melahirkan ide-ide baru atau solusi kreatif; peningkatan partisipasi aktif; meningkatkan kesadaran; dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Amalia Laila Qudsy, Siti Maizul Habibah, 2023). Kedua, dampak negatif ketika mahasiswa melaksanakan hak atas kebebasan berekspresi yaitu memiliki pendapat dan ide yang berbeda dapat saling bertentangan dan menimbulkan konflik; menimbulkan ketidakharmonisan; menimbulkan kekerasan; menimbulkan polarisasi (Amalia Laila Qudsy, Siti Maizul Habibah, 2023). Walaupun demikian kebebasan atas berekspresi harus dan wajib diperjuangkan dan disuarakan karena merupakan hak asasi manusia mendasar yang merupakan pemberian tuhan yang tidak dapat diintervensi juga dengan adanya kebebasan berekspresi memberikan pengawasan pemerintah atas penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

### **Realitas Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia Dan Penerapannya Pada Pendekatan Hierarkis Dan Konformitas**

Mahasiswa, sesuai dengan makna istilahnya “maha” dan “siswa” dipandang

sebagai insan pembelajar yang memiliki kapasitas lebih dan diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Dalam sejarah bangsa, khususnya pada masa Orde Baru, mahasiswa terbukti menjadi kekuatan utama dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Mereka berperan sebagai penggerak utama dalam memperjuangkan reformasi dan menumbangkan rezim otoriter. Namun realitas yang terjadi di era saat ini menunjukkan adanya penurunan kualitas peran mahasiswa. Keberanian untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, serta menjadi motor perubahan sosial semakin jarang terlihat. Kepekaan terhadap isu-isu sosial pun mengalami penurunan, seolah tergerus oleh dinamika zaman dan kultur akademik yang pasif. Padahal, sejarah mencatat bahwa mahasiswa memiliki peran krusial dalam mengawal arah perjalanan bangsa. Mahasiswa era 1990-an misalnya, dikenal gigih memperjuangkan reformasi yang mana mereka berdiri tegak, kritis, dan tidak gentar dalam menghadapi risiko demi terwujudnya perubahan. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai apa yang menjadi akar penyebab terjadinya penurunan kualitas peran mahasiswa sebagai agen perubahan?

Dalam kajian sebelumnya, disebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pertama, faktor kemiskinan akibat pendapatan yang berada di bawah standar hidup layak. Kedua, sistem pengelolaan pendidikan yang tidak berbasis akademik, melainkan berada di bawah kendali birokrasi pemerintahan (Kukuh Wurdianto, Dewi Ratna Juwita, Yossita Wisman, Bernisa, 2024). Terkait faktor kedua, penulis mempertanyakan kualitas sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan dan budaya institusionalnya. Sistem pendidikan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur yang hierarkis serta nilai-nilai konformitas yang tertanam kuat dalam budaya akademik. Kondisi ini menimbulkan jarak antara pendidik dan peserta didik, menghambat ruang dialog kritis, serta melemahkan semangat berpikir bebas dan pembentukan karakter intelektual yang merdeka. Penulis dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada tingkat perguruan tinggi masih menunjukkan pola yang kurang mendukung kebebasan berekspresi mahasiswa. Mahasiswa sering kali tidak diberikan ruang yang memadai untuk terlibat aktif dalam dinamika kehidupan kampus. Ekspresi kritis mereka kerap dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas atau kenyamanan institusi, sehingga segala bentuk partisipasi mahasiswa cenderung dipandang hanya sebagai formalitas berupa pelengkap administratif dan bukan sebagai bagian dari proses pembentukan intelektual dan kepedulian sosial yang autentik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Arum dan Roksa dalam *Academically Adrift* (2011), yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya mengalami sedikit peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis selama masa studi mereka di perguruan tinggi. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya tantangan intelektual dan dominasi metode pembelajaran yang berorientasi pada hafalan. Akibatnya, mahasiswa cenderung mencari jawaban instan tanpa melalui proses berpikir reflektif atau mendalam. Kemampuan bernalar mereka lebih diarahkan pada penguasaan fakta-fakta yang dapat dihafal ketimbang pada pengembangan logika, analisis, dan sintesis sebagai pilar berpikir kritis.

Schiro dalam *Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns* (2013) juga menegaskan bahwa paradigma pendidikan tradisional lebih menitikberatkan pada akumulasi pengetahuan yang dapat diukur secara kuantitatif, sementara kemampuan

## **Mahasiswa Sebagai Role Model Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi Magistrorum Et Scholarium**

berpikir kritis yang lebih kompleks dan kontekstual seringkali diabaikan karena sulit diukur secara langsung, padahal justru sangat relevan untuk kehidupan bermasyarakat dan profesional. Selain itu, mahasiswa yang memasuki jenjang pendidikan tinggi sering kali belum terbiasa dengan proses penalaran kompleks. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan sebelumnya tidak mendorong pengembangan kemampuan logis dan berpikir reflektif. Perguruan tinggi pun belum sepenuhnya mampu mengatasi kekosongan ini dikarenakan pengelolaan institusi pendidikan masih bersifat birokratis, elitis, dan eksklusif. Sistem semacam ini tidak hanya memperlemah semangat keilmuan yang egaliter, tetapi juga menjauhkan kampus dari fungsinya sebagai ruang publik yang inklusif, terbuka terhadap keragaman gagasan dan latar belakang sosial.

Dengan demikian, model pendidikan yang masih mengakar pada struktur hierarkis dan pendekatan satu arah telah menghambat pembentukan mahasiswa sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, dan peduli terhadap realitas sosial di sekitarnya. Pendidikan tinggi semestinya menjadi ruang dialektika tempat pencarian kebenaran dan pertumbuhan intelektual yang hidup dalam tradisi berpikir terbuka dan reflektif. Namun, realitas yang berkembang justru menunjukkan dominasi budaya hierarkis yang kaku antara dosen dan mahasiswa. Relasi yang seharusnya egaliter berubah menjadi komunikasi satu arah, di mana dosen diposisikan sebagai pemegang kebenaran mutlak, sementara mahasiswa hanya dianggap sebagai pendengar pasif. Ungkapan “dosen tak selalu benar, mahasiswa tak selalu salah” seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai ajakan untuk menghidupkan kembali esensi proses belajar yang sejati. Dalam pandangan filsafat ilmu, kebenaran bukan milik satu pihak, melainkan lahir dari proses dialog, keraguan intelektual, dan keterbukaan untuk saling belajar.

Dalam struktur ini, posisi dosen, dekan, hingga rektor berada dalam tatanan yang bersifat *top-down*, sedangkan mahasiswa berada dalam posisi subordinat. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya ruang dialogis antara mahasiswa dan pihak otoritas kampus. Menurut Freire (2005) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, sistem pendidikan yang bersifat "*banking system*" di mana dosen memposisikan diri sebagai pemberi pengetahuan dan mahasiswa hanya sebagai penerima pasif menimbulkan dominasi struktur dan melemahkan daya kritis peserta didik. Di banyak kampus Indonesia relasi seperti ini masih lazim di mana kritik dari mahasiswa sering dianggap sebagai bentuk pembangkangan bukan kontribusi intelektual. Bahkan tidak sedikit perguruan tinggi yang memberlakukan aturan ketat terhadap aktivitas mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan aktivitas politik. Izin untuk berorganisasi, berdemonstrasi, atau mengadakan diskusi publik sering kali dibatasi atau bahkan dilarang. Mahasiswa yang vokal dalam mengkritisi kebijakan institusi atau mengekspresikan pandangan yang berbeda seringkali menghadapi sanksi akademik atau administratif. Hal ini menciptakan efek jera yang membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa. Sistem evaluasi dan penilaian yang menekankan keseragaman jawaban dan pemikiran menciptakan budaya konformitas. Mahasiswa cenderung menghindari mengekspresikan ide-ide yang berbeda karena takut mendapat nilai buruk. Dengan demikian, pendekatan hierarkis dan nilai konformitas yang dominan di sistem pendidikan tinggi menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi tumbuhnya kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi paradoks besar ketika mahasiswa

sekaligus diharapkan menjadi aktor utama dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di masyarakat.

Secara normatif, mahasiswa diposisikan sebagai agen perubahan dan *role model* kebebasan berekspresi, baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan. Namun dalam praktiknya sistem pendidikan tinggi yang masih kental dengan nilai-nilai hierarkis dan konformitas justru membatasi ruang ekspresi tersebut. Kontradiksi ini melahirkan berbagai dampak multidimensional. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjadi contoh dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi sedangkan di sisi lain, sistem kampus membatasi ruang ekspresi tersebut melalui regulasi dan tekanan informal. Ketegangan ini dapat menimbulkan kecemasan, frustrasi, dan kehilangan arah dalam mengekspresikan pandangan secara bebas. Dalam kondisi represif, mahasiswa kerap memainkan peran ganda, mahasiswa menjadi konformis dalam lingkungan kampus untuk menghindari sanksi namun berperan sebagai aktivis kritis di luar kampus atau di media sosial. Fragmentasi ini menciptakan inkonsistensi dalam perilaku yang pada gilirannya menurunkan kredibilitas dan otentisitas mereka sebagai *role model* kebebasan berekspresi. Budaya akademik yang menekankan kepatuhan dan konformitas berkontribusi terhadap penurunan daya kritis mahasiswa. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman dan bukan sebagai bagian dari proses belajar, mahasiswa menjadi terbiasa dengan pola pikir yang pasif dan tidak terbiasa menyampaikan pendapat secara argumentatif. Hal ini melemahkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang berbasis pada refleksi dan analisis. Kontradiksi yang terus dibiarkan dapat menyebabkan delegitimasi institusi pendidikan tinggi. Kampus tidak lagi dipandang sebagai ruang aman bagi pertukaran gagasan, melainkan sebagai lembaga formal yang memproduksi lulusan tanpa membekali mereka dengan kemampuan berpikir bebas dan bertanggung jawab.

### **Uksw Dalam Visi *Magistrorum Et Scholarium***

Universitas Kristen Satya Wacana atau dikenal dengan UKSW merupakan perguruan tinggi yang memiliki idealisme yang kaya. Satya Wacana memiliki tugas mendidik manusia yang diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan, rahim mempersiapkan sekelompok orang untuk hidup di dalam suatu masyarakat menurut konteks kebudayaan masyarakat tersebut, mewujudkan *creative minority* (minoritas yang berdaya cipta) atau mewujudkan golongan kecil, yang oleh karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan keyakinannya sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif untuk bergiat dalam pembangunan (Eliazer Amba Karaeng & Mariano Ombo 2020).

UKSW mempunyai visi dan misi. Visi UKSW terdiri dari:

1. Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.
2. Menjadi Universitas *Magistrorum et scholarium* untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta (*creative minority*) bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia.
3. Menjadi pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang sedang membangun.
4. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan, politik, moral dan rohaniah, yang mensinyalir, mencatat perubahan-perubahan itu.
5. Menjadi pelayanan yang memberi kritik yang normatif kepada gereja dan masyarakat.

Misi UKSW terdiri dari:

## Mahasiswa Sebagai Role Model Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi *Magistrorum Et Scholarium*

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu
  - a. Pendidikan dan pengajaran tinggi
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian kepada masyarakat
2. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang berarti bahwa hidup dan kegiatan-kegiatannya pada satu pihak mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan Iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak lain menjawab secara tepat dan bertanggung-jawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta negara Republik Indonesia.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis prinsipiil dan kreatif-realistis, berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Allah.
4. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan yang adil, bebas, tertib serta sejahtera.
5. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara iman Kristen dengan berbagai bidang ilmu dan kegiatan atau pelayanan.
6. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang bertanggungjawab yang berpedoman pada kebenaran, keadilan, dan kasih.

Visi Universitas Kristen Satya Wacana terbentuk atas dasar filsafat keberadaan UKSW dan Misi dibuat untuk dalam rangka memberikan petunjuk atau garis dalam mengupayakan terwujudnya visi (Yakub Adi Krisanto, 2012). Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan, penulis menyoroti salah satu idealisme Satya Wacana yang tertuang dalam visi yang kedua yaitu Menjadi Universitas *Magistrorum et scholarium* untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta (*creative minority*) bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Dalam visi ini manusia UKSW harus mempunyai karakter kreatif (daya cipta) untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Karakter kreatif ini harus dimiliki untuk menjadi pembeda, sekaligus menjadi bagian dari kemampuan mengambil peran yang diharapkan yaitu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Di dalam karakter kreatif tersebut ada kesadaran UKSW sebagai lembaga pendidikan Kristen yang minoritas. Minoritas tersebut memiliki dua aspek yaitu minoritas dalam hal keyakinan (agama) dan minoritas sebagai perguruan tinggi (swasta). Kedua aspek minoritas yang melekat dari UKSW mengharuskan (manusia) UKSW memiliki daya pembeda yaitu berdaya cipta. Daya cipta dalam menggumuli pengetahuan dan berolah intelektual untuk memberi sumbangsih bagi pembaruan masyarakat Indonesia. Identitas minoritas berdaya cipta ini diletakkan dalam dua hal yaitu pembangunan dan pembaruan masyarakat. UKSW tidak hanya berperan dalam pembangunan Indonesia, melainkan terus menerus melakukan pembaruan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Penyesuaian diri ini mutlak dibutuhkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat, sehingga masyarakat tidak mengalami ketertinggalan atau gagap teknologi. Peran (manusia) UKSW dalam pembaruan masyarakat adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus kegunaannya dapat meningkatkan harkat masyarakat dalam berbangsa dan bernegara (Yakub Adi Krisanto, 2012).

Melalui visi UKSW kedua yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Magistrorum et Scholarium* memberikan landasan filosofis dimana dosen dan mahasiswa ditempatkan setara sebagai mitra intelektual dalam mencari kebenaran. Visi yang kedua ini juga merepresentasikan sebuah model pendekatan yang humanis dan lebih demokratis, dimana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpikir sangat dijunjung

tinggi dan dihormati dalam lingkungan kehidupan kampus. Melalui visi ini UKSW menjadi salah satu perguruan tinggi dalam mengatasi kontradiksi yang selama ini menjadi masalah ketika terjadi hierarkis dan tidak-setaraan antara dosen dan mahasiswa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi mendasar antara peran ideal mahasiswa sebagai role model kebebasan berekspresi dengan realitas sistem pendidikan tinggi Indonesia yang masih hierarkis dan konformis. Struktur akademik yang top-down, budaya senioritas, dan pembatasan ruang ekspresi telah melemahkan daya kritis mahasiswa serta mengurangi efektivitas mereka sebagai agen perubahan. Namun, model egaliter seperti visi Magistrorum et Scholarium dari UKSW menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan demokratis dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif mendalam, seperti wawancara dengan mahasiswa dan dosen, guna menguji implementasi visi Magistrorum et Scholarium di berbagai perguruan tinggi. Selain itu, perlu dikembangkan kerangka kebijakan yang mendorong reformasi sistem pendidikan nasional berbasis prinsip demokrasi, partisipasi, dan kebebasan akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2016). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dalam dinamika politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 101–115. <https://doi.org/10.22146/jsp.2016.28911>
- Amalia, L. Q., & Siti, M. H. (2023). Kebebasan mahasiswa dalam berpendapat dari perspektif HAM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 3041–3042.
- Anshari, M., Hamid, N. A., Almunawar, M. N., & Lim, S. A. (2020). Civic engagement and youth activism in Southeast Asia: Digital platforms and democratic discourse. *Telematics and Informatics*, 52, 101433. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101433>
- Eliazer, A. K., & Mariano, O. (2020). *Diskusi brainstorming sejarah singkat & idealisme UKSW*.
- Fauzi, I. (2021). Mahasiswa dan perannya sebagai agen perubahan di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(1), 22–29. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v11i1.1234>
- Gunawan, A. (2018). Hak atas kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 453–470. <https://doi.org/10.31078/jk1535>
- Guntaradewa, O. Y. (2018). *Motif Tindakan Mahasiswa dalam Gerakan Mahasiswa Mengajar*. Universitas Airlangga.
- Hamid, R. (2017). Mahasiswa dan kebebasan akademik: Antara idealisme dan realitas kampus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(4), 567–576. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v22i4.704>
- Harahap, A., & Yusuf, M. (2023). Dinamika peran mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 15–29. <https://doi.org/10.22146/jsp.78321>
- Krisanto, Y. A. (2025, Juni 22). *Merenung dan memakna kembali visi & misi UKSW*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/yakubadi/550e4048a33311bf2dba8061/merenung-dan-memakna-kembali-visi-misi-uksw>
- Nurhayati, E., & Wulandari, N. (2022). Kebebasan berekspresi dalam ruang akademik: Tinjauan dari perspektif HAM dan etika keilmuan. *Jurnal HAM*, 13(2), 231–244. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.231-244>

## **Mahasiswa Sebagai Role Model Dalam Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Belajar Dari Uksw Berdasarkan Visi Magistrorum Et Scholarium**

- Pambudi, D., & Handayani, R. (2022). Peran historis mahasiswa dalam gerakan sosial politik di Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 16(2), 77–90. <https://doi.org/10.31002/jsb.v16i2.4567>
- Savitri, L., & Rahman, A. (2020). Role model sebagai strategi penguatan karakter mahasiswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(3), 179–188. <https://doi.org/10.26858/jppk.v6i3.14679>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan berekspresi di era demokrasi: Catatan penegakan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 190.
- Setiadi, A. (2020). Academic freedom and students' right to express: A legal and sociological analysis. *Indonesian Journal of Human Rights Law*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.19184/ijhr.v5i1.17821>
- Siregar, R. (2018). Kaum intelektual dan transformasi sosial: Studi pemikiran Edward Shils. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 15–29. <https://doi.org/10.22146/jf.2018.28219>
- Subekti, H., & Wulandari, M. (2019). Mahasiswa dan demokrasi: Kajian partisipasi politik mahasiswa di perguruan tinggi. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.21009/jdp.v4i1.215>
- Syahputra, I. (2019). Mahasiswa dan kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi: Antara hak dan tanggung jawab. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 9(2), 89–101. <https://doi.org/10.21009/jdham.v9i2.231>
- Widodo, A., & Fauzan, R. (2021). Hak sipil dan politik dalam kerangka negara hukum Indonesia: Tinjauan konstitusional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 512–526. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.2781>

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

